UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENERAPAN SISTEM E-BILLING DITINJAU DENGAN ASAS EFISIENSI GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara)
ZAID RIZAL IBRAHIM N, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin , 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C.V. Brown and P.M. Jackson, *Public Sector Economics: Third Edition*, Basil Blackwell, Great Britain.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta.

Gunadi, 2013, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee MediaIndonesia, Jakarta.

Kusumaatmadja Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangu*nan, Alumni, Bandung.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* . Andi, Yogyakarta.

Notoatmodjo Soekidjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta,

Nurmantu, 2007, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.

Pudyatmoko Y. Sri, Pengantar Hukum Pajak, 2009, Andi:Yogyakarta.

Rahayu Siti Kurnia, 2010, *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Rosdiana Haula dan Edi Slamet Irianto, 2012, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Pers, Jakarta.

Sari Diana, 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Shorde William A. dan Dan Voich Sebagaimana dikutip oleh: Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN SISTEM E-BILLING DITINJAU DENGAN ASAS EFISIENSI GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara)
ZAID RIZAL IBRAHIM N, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Soemitro Rochmat, 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.

Suandy Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta.

Sumitro Ronny Hanintyo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zain Moh., 2004, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

B. Artikel/Jurnal

KPP Pratama Jepara, Register Pbk, diterbitkan 4 Maret 2019.

Supadmi Ni Luh, Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, [S.l.], July 2009. ISSN 2303-1018.

Andianto, Avian Nur dan Amelia Ika Pratiwi. 2017. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang. Seminar Nasional & Call For Paper Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global*. 17 Mei. Universitas Brawijaya. Malang.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Riandari Fauziah, 2015, *Pengembangan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Pada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada*, Tugas Akhir, D3 Akuntansi SV Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yulianita Kartika, 2016, *Preferensi* Wajib Pajak *Dalam Pembayaran Pajak Kurang Bayar Menggunakan E-Billing Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta*, Tugas Akhir, D3 Akuntansi SV Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Abdul Kadir, "Asas dan Dasar Pemungutan Pajak", *http://abdulkadir .blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2018/01/BAB-II-kapita-selekta-perpajakan.pdf*, diakses tanggal 11 Mei 2019.

Direktorat Jenderal Pajak, "Electronic Billing", *http://www.pajak.go.id/electronic-billing*, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Mengenal Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua", *https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/booklet _mpn_g2%20publish.pdf*, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN SISTEM E-BILLING DITINJAU DENGAN ASAS EFISIENSI GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara)
ZAID RIZAL IBRAHIM N, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Forum Pajak, "Peta Masalah *e-billing", https://epajak.org/peta-masalah-e-billing-pajak/* diakses pada tanggal 14 Maret 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengetahuan", *https://kbbi.web.id/pengetahuan,* diakses 3 Juni 2019.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "MPN G2", *https://www.kemenkeu.go.id/single-page/mpn-g2/,* diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Kementerian Keuangan RI,"Kartin1 Satu Kartu Untuk Semua", *https://www.kemenkeu.go.id/ publikasi/berita/kartin1-satu-kartu-untuk-semua/,* diakses pada tanggal 1 Juli 2019.

Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, "Siap-Siap, *E-Billing* Mulai Berlaku pada 1 Juli" *https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/siap-siap-e-billing-mulai-berlaku-pada-1-juli,* diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

KPP Pratama Mamuju, "*e-billing* cara mudah bayar pajak", *https://www.youtube.com/ watch?v=Qa6bVS9iZTU,* diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

Ortax, "Forum Ortax", *http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik= 18057,* diakses pada tanggal 14 Maret 2019.

Ortax, "Forum Ortax", *https://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=search&forumid=&tgla=2007-4-19&tglz=2019-3-14&q=billing&q_do =macth&cols=isi&hlm=3#jdltopic*, diakses pada tanggal 14 Maret 2019.

Padhang Pranoto, "Diskominfo Jepara Keluhkan Bandwidth Internet di Kota Ukir", https://www.murianews.com/2017/09/30/127251/diskominfo-jepara-keluhkan-bandwidth-internet-di-kota-ukir.html, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENERAPAN SISTEM E-BILLING DITINJAU DENGAN ASAS EFISIENSI GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara)
ZAID RIZAL IBRAHIM N, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keungan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/Pmk.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2002 tanggal 16 Desember 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pemindahbukuan atas Kekeliruan Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan.

PER-30/PJ/2018 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dalam Rangka Simplifikasi Regulasi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/Pj/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/Pj/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENERAPAN SISTEM E-BILLING DITINJAU DENGAN ASAS EFISIENSI GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara)
ZAID RIZAL IBRAHIM N, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

PER-35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan.

F. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Kusuma DJaja, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan KPP Pratama Jepara pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 di KPP Pratama Jepara pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019.

Hasil Wawancara dengan 100 WP yang menggunakan *e-billing* dan datang langsung ke KPP Pratama Jepara pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 di KPP Pratama Jepara pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019.